

Nama : Zakia Unnisa

NIM : 190430058

Judul : ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN DI PROVINSI ACEH

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu indikator yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan ekonomi. Selain pertumbuhan ekonomi, terdapat tiga indikator pembangunan ekonomi lain yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan kesempatan kerja. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi belum tentu mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta meningkatkan kesempatan kerja. Bahkan pertumbuhan ekonomi yang pesat bisa saja diikuti dengan proses pemiskinan sebagian besar masyarakat, menaikkan tingkat ketimpangan pendapatan, dan tidak menciptakan pekerjaan secara berarti bagi pencari kerja (Todaro, 2017).

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih perlu dibenahi dalam hal distribusi pendapatan di daerahnya. Walaupun sempat mengalami masa konflik yang berkepanjangan sejak tahun 1976 sampai tahun 2005, Provinsi Aceh memiliki peluang yang besar untuk berkembang terutama disebabkan oleh potensi sumber daya alamnya yang melimpah. Menurut data Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (2019), cadangan minyak dan gas yang dimiliki Provinsi Aceh mencapai 320 miliar barrel, angka ini merupakan jumlah yang besar karena jika dibandingkan dengan Negara Arab Saudi yang volumenya sebesar 264,21 miliar barrel saja diperkirakan bisa dieksplorasi hingga 250 tahun. Selain itu, Aceh juga

memiliki sumber tenaga air yang mencapai 2.626 MW, cadangan batubara sebanyak 1300 juta ton, dan masih banyak potensipotensi alam lainnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dari 2016-2020 cenderung mengalami fluktuasi yang menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam perekonomian Provinsi Aceh. Namun demikian, ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Aceh juga terlihat fluktuasi dibuktikan dengan nilai rasio gini pada tahun 2016-2020. Hal ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa di Aceh terdapat permasalahan dalam hal ketimpangan distribusi pendapatan.

Berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Aceh merupakan inti dari suatu pembangunan. Dengan berhasilnya suatu pembangunan di Provinsi Aceh, maka dengan sendirinya juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Aceh, yang mana dari hasil-hasil tersebut harus dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat. Sehingga dengan adanya hal ini, permasalahan ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan tidak akan terjadi lagi. Ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah merupakan masalah besar yang sedang dihadapi Indonesia saat ini, sehingga menyebabkan kesenjangan ekonomi dan berdampak pada kemiskinan yang semakin meningkat.

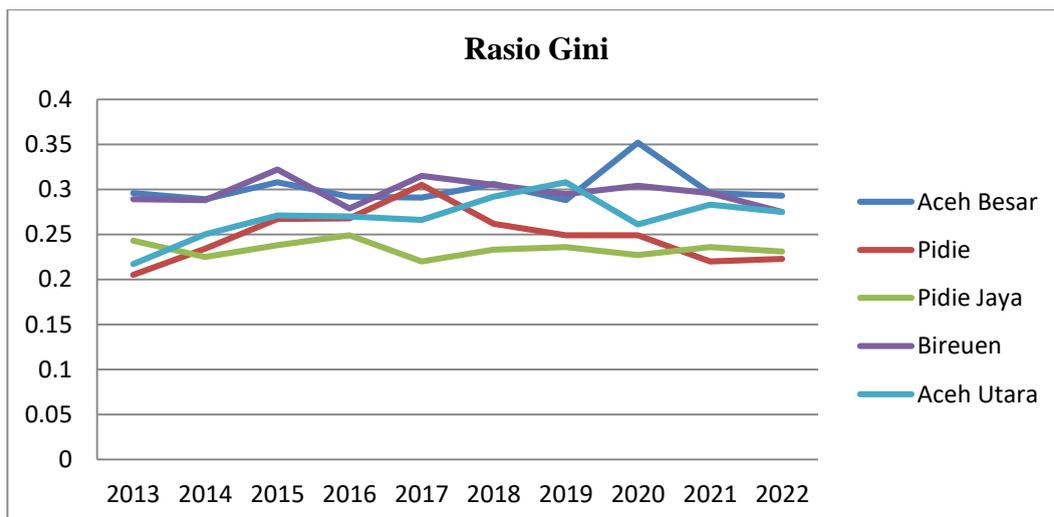
Ketimpangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kemiskinan, karena pada umumnya hal ini merupakan indikator kemiskinan relatif, yaitu kesenjangan antara golongan yang kaya dan miskin. Rendahnya tingkat ketimpangan

atau semakin meratanya distribusi pendapatan, tentunya merupakan salah satu agenda penting pembangunan ekonomi (Siara, 2021).

Provinsi Aceh, kemiskinan dan kesenjangan pendapatan warganya terlihat sangat mencolok. Ukuran distribusi pendapatan perorangan merupakan ukuran yang paling sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan ekonomi masyarakat dalam suatu daerah. Hal ini semakin terlihat dengan jumlah kemiskinan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada ditengah-tengah masyarakat baik di Provinsi Aceh maupun lainnya yang juga merupakan isu penting untuk ditinjau dan perlu adanya berbagai upaya dari pemerintah dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat, serta peningkatan taraf hidup masyarakat melalui berbagai macam usaha dalam rangka peningkatan distribusi peningkatan dari berbagai macam aspek yang ada.

Ketimpangan ekonomi di Provinsi Aceh merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bila pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Terjadinya ketimpangan ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketimpangan yang terjadi di suatu daerah adalah dengan melihat koefisien gini (*gini ratio*). Nilai rasio gini yaitu antara nilai 0 sampai dengan 1. Rasio gini lebih kecil dari 0,4-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan nilai lebih besar dari 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk negara-negara yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35 (Shofia, 2018). Indeks Gini antar kabupaten di Provinsi Aceh dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: BPS, 2023

Gambar 1.1 Indeks Gini Antar Kabupaten di Pro 2013-2022 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa ketimpangan antar Kabupaten di Provinsi Aceh tiap tahunnya tidak pernah merata atau selalu terjadinya naik turun. Fenomenanya dari tahun 2013-2022 di Provinsi Aceh besar terlihat bahwa pada tahun 2020 ketimpangan pendapatan mengalami kenaikan sebesar 0,35, artinya ketimpangan pendapatan pada tahun tersebut berada pada kategori sedang atau pendapatan masyarakat belum merata. Hal ini juga disebabkan oleh adanya pandemi

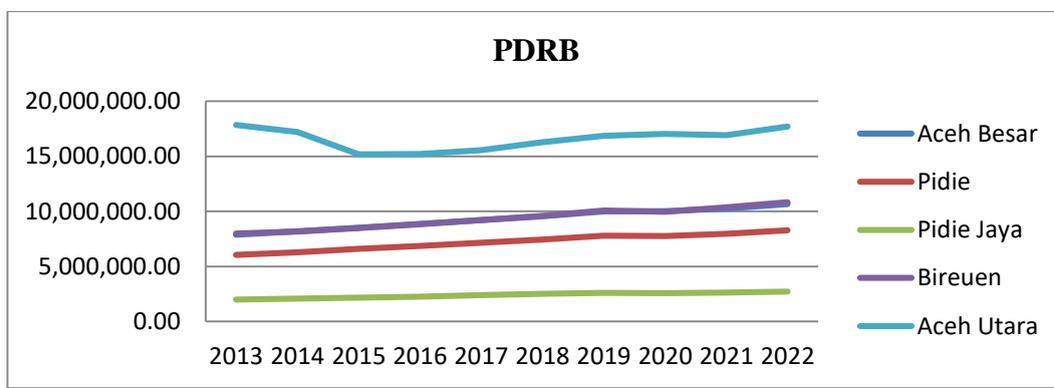
Covid-19 di tahun tersebut, sehingga diberlakukannya pembatasan akses kegiatan ekonomi yang menyebabkan pendapatan penduduk tidak merata.

Hal ini sesuai dengan penelitian Irawan et al, (2022) yang menyatakan bahwa pandemi memberikan dampak buruk bagi kegiatan ekonomi dan hal ini ikut mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2015 Kabupaten Bireuen juga mengalami kenaikan ketimpangan yang berada diatas 0,32 artinya pemerataan pendapatan penduduk belum cukup baik. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun pada tahun 2016 dan 2022 ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bireuen berada pada kategori baik yaitu sebesar 0,279 dan 0,275.

Adapun kaitan indeks gini dengan ketimpangan merupakan suatu hal yang diperlukan untuk menentukan tingkat ketimpangan pendapatan. Indeks gini ini terdiri dari nilai 0 sampai 1. Jika indeks gini senilai 0 maka ketimpangan pendapatan merata sempurna, yang artinya setiap orang sudah menerima pendapatan dengan jumlah yang sama. Sedangkan jika indeks gini sama dengan 1 maka artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna, atau dengan kata lain pendapatan hanya diterima oleh satu orang ataupun satu kelompok saja.

Ketimpangan pendapatan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat pengangguran dan juga pendidikan, dimana pendidikan dapat membentuk sumber daya manusia sehingga dapat mengolah sumber daya alam semaksimal mungkin yang berefek kepada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan semakin tingginya Produk Domestik Regional Bruto maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk diwilayah tersebut juga semakin tinggi (Shofia,

2018). Dalam penelitian ini penulis meneliti di Provinsi Aceh dikarenakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh merupakan pertumbuhan ekonomi terendah di Sumatera. Kemudian penulis mengambil 5 Kabupaten saja sebagai bahan penelitian dikarenakan 5 Kabupaten tersebut merupakan Kabupaten dengan nilai rasio gini serta PDRB dan jumlah penduduk yang tidak stabil. Untuk lebih jelasnya grafik mengenai perkembangan PDRB di Provinsi Aceh dijelaskan sebagai berikut:

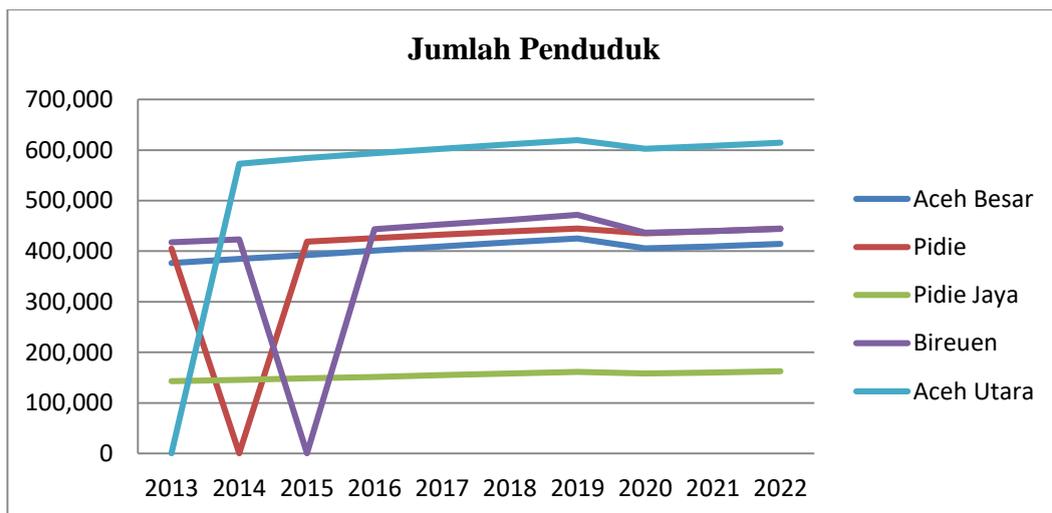


Sumber: BPS, 2023

Gambar 1.2 PDRB Antar Kabupaten Provinsi Aceh Tahun 2013-2022 (Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa PDRB di Provinsi Aceh setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 ada beberapa Kabupaten di Provinsi Aceh mengalami penurunan seperti di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya dan juga Kabupaten Bireuen. Dimana penurunan yang terjadi di Kabupaten Pidie sebesar Rp.7.770.640,80 dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 7.780.357,55. Sedangkan di Pidie Jaya menurun sebesar Rp.2.583.128,30 dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.603.588,96, begitu dengan Kabupaten Bireuen menurun sebesar Rp. 9.962.578,95 dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 10.065.427,74. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan terjadi perubahan sistem ekonomi serta aktivitas kegiatan ekonomi baik dalam produksi dan sebagainya di

batasi. Fenomenanya, jika dilihat berdasarkan Kabupaten, maka pertumbuhan ekonomi yang paling baik adalah di Kabupaten Aceh Utara, dimana dari kelima Kabupaten pada gambar menjelaskan bahwa Kabupaten Aceh Utara merupakan Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Perbedaan PDRB antar Kabupaten di Aceh memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan di Provinsi Aceh. Selain adanya tingkat fluktuasi pada nilai PDRB, Kabupaten di Provinsi Aceh juga mengalami peningkatan dan juga penurunan jumlah penduduk setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk dijelaskan berdasarkan gambar berikut ini:



Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Antar Kabupaten di Provinsi Aceh Tahun 2013-2022 (Jiwa)

Berdasarkan gambar di atas, menjelaskan bahwa jumlah penduduk antar Kabupaten di Provinsi Aceh juga mengalami fluktuasi dan jumlah penduduk terbanyak ada di Kabupaten Aceh Utara. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang kondisi dan perkembangan pembangunan daerah di wilayah Provinsi Aceh, akan dibahas ketimpangan distribusi pendapatan dan lajunya pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari PDRB dan jumlah penduduk. Fenomenanya penambahan

jumlah penduduk memberikan dampak pada nilai PDRB dan rasio gini, dimana rasio gini mengalami fluktuasi yang mengakibatkan PDRB ikut naik turun. Hal ini sesuai dengan penelitian Naibaho et al (2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk juga terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah menyadari bahwa masalah kesenjangan yang terjadi baik antar wilayah maupun antar daerah, sangat penting untuk ditanggulangi. Karena masalah ini selain menimbulkan permasalahan ekonomi dan sosial, juga dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan disintegrasi. Dimana kesenjangan antar wilayah masih merupakan kondisi yang nyata yang sampai saat ini masih dirasakan oleh masyarakat. Apabila, jumlah penduduk meningkat (tinggi) sedangkan pertumbuhannya rendah, maka akan terjadi masalah dan menyebabkan meningkatnya ketimpangan di Provinsi Aceh.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga banyak membahas mengenai ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi seperti penelitian Soundakh et al, (2023) menyatakan bahwa dengan hasil penelitian yang melihat pertumbuhan ekonomi melalui tipologi klassen di Sulawesi Utara berdasar perhitungan Indeks Williamson (IW) kota Manado termasuk kota dengan rata-rata tingkat ketimpangan berada pada level sedang dengan tingkat ketimpangan dari tahun 2011-2021 yaitu 0,37. Sedangkan 3 kota lainnya berada dalam level rendah kota Bitung senilai 0,21, kota Tomohon senilai 0,13 dan kota Kotamobagu senilai 0,17. Dari analisis Tipologi Klassen kota Manado dan kota Bitung berada dalam daerah kuadran III yaitu daerah yang masih dapat berkembang pesat, kota Tomohon berada dalam daerah kuadran II

yaitu daerah maju tapi tertekan, dan kota Kotamobagu berada dalam daerah kuadran I yaitu daerah maju dan tumbuh dengan pesat.

Selanjutnya penelitian Samsulijar et al., (2019) menyatakan bahwa adanya pengaruh jumlah penduduk dan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan. Kemudian penelitian Andriyani (2022) yang menyatakan bahwa pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh.

Studi terdahulu mempunyai perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis dimana penelitian Andriyani (2022) mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu terdapat variabel ketimpangan pendapatan. Sedangkan perbedaan terdapat pada variabel bebas yaitu penulis melihat tingkat pertumbuhan ekonomi dari PDRB dan jumlah penduduk. Alat analisis yang digunakan juga berbeda dimana Andriyani (2022) menggunakan analisis regresi berganda, sedangkan penulis menggunakan regresi data panel. Kemudian penelitian Samsulijar et al., (2019) mempunyai persamaan dengan penulis yaitu melihat ketimpangan, yang membedakan yaitu alat analisis yang digunakan dimana penuli menggunakan analisis regresi berganda, sedangkan penelitian sebelumnya menganalisis menggunakan indeks williamson dan tipologi klassen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait **“Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Provinsi Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kondisi yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah referensi ilmiah dalam bidang pengetahuan yang berhubungan dengan analisis distribusi pendapatan yang ditinjau dari aspek sosial ekonomi.

a. Secara Praktis

1. Bagi pemerintah sebagai bahan masukan dalam menganalisis supaya adanya perhatian lebih dalam meningkatkan PDRB, perbaikan perlu dilakukan agar ketimpangan pendapatan dapat menurun dimasa yang akan datang.
2. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi untuk pengembangan dan keterampilan, serta bisa menjadi bahan

evaluasi untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada dalam menurunkan ketimpangan pendapatan.

3. Bagi swasta, sebagai sumber informasi untuk melakukan pengembangan perekonomian yang lebih berguna.

b. Secara Akademis

1. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk berlatih dalam pengembangan penulisan karya ilmiah dan bisa dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan ketimpangan pendapatan.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan evaluasi proses belajar-mengajar pada program studi dan dapat dijadikan referensi sebagai rekomendasi untuk penelitian dan memperoleh informasi tambahan.